



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**



<http://diskominfo.sumutprov.go.id>

EDISI APRIL - JUNI 2017



EDISI APRIL - JUNI 2017

TIM PENYUSUN



APRIL

- 3** Mendampingi Peninjauan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) SMK Negeri 10 Medan
- Mendampingi Peninjauan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) SMK Negeri 8 Medan
- 5** Menghadiri Dialog Interaktif Gubernur Sumatera Utara dengan Ketua KPK LPP TVRI Sumut
- 6** Laporan Ketua Korsupgah Provinsi Sumatera Utara pada Acara Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provsu dan Penandatanganan Komitmen Bersama 18 Kepala Daerah tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
- 7** Mengikuti kegiatan Ceramah Ketua KPK RI Agus Rahardjo tentang Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi
- 10** Menghadiri Upacar Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Angkatan X Tahun 2017
- Mendampingi Peninjauan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Berbasis Komputer (UANBK) SMA Negeri 1 Medan
- Mendampingi Wagubsu Menerima Kunjungan Dewan Ketahanan Nasional
- 11** Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Pemred Metro Online

- 13** Menyerahkan 6 Orang Tenaga Pendukung Diskominfo Provsu untuk Diperbantukan ke Biro Humas dan Keprotokolan Provsu
- Menghadiri Dialog Khusus dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke 69 Tahun 2017
- 17** Memimpin Upacara Bendera secara Rutin yang Dilaksanakan Setiap Bulan
- Menziarahi Makam para Gubernur Sumatera Utara pendahulu antara lain Marah Halim Harahap, Raja Inal Siregar dan Tengku Rizal Nurdin Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan
- Menghadiri Pelaksanaan *Workshop* Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak se Sumatera Utara
- Mengikuti Resepsi Jamuan Makan Siang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke 69 Tahun 2017
- 18** Membuka *Workshop* Sosialisasi E- Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2017 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara untuk 2018
- Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Pengurus Baznas Provsu yang diketuai Amansyah Nasution
- Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara

- 19** Bersama Juri menilai Photo Peserta Lomba Photo dan Karya Tulis dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke- 69 tahun 2017
- 20** Narasumber Sosialisasi Sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah (*E-Planning*)
- Menerima Audiensi Tribrata News Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara
- 24** Menyerahkan Hadiah kepada Pemenang Perlombaan Photo Jurnalis dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke 69 Tahun 2017
- 26** Membuka Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- Memberikan Hadiah kepada Pemenang Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
- 27** Membacakan Pidato Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara Pembukaan Lomba Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara
- Menghadiri Peresmian Peluncuran Tujuh Aplikasi e-Government Pemkab Pakpak Bharat
- Memberikan Hadiah kepada Pemenang Lomba Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara

MEI

- 2** Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Badan Otoritas Danau Toba
- Memimpin Rapat Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provsu
- 3** Menerima Audiensi Pusat Penelitian Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia
- 6** Menghadiri Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan ke-XV tahun 2017
- 8** Mendampingi Gubsu Menerima Audiensi Partai Berkarya Sumatera Utara
- Mendampingi Gubsu Menerima Audiensi Wakil Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus
- Mendampingi Gubsu Menerima Audiensi YKBJAI
- 9** Menerima audiensi Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provsu H.M. Zaki Abdullah di dampingi Wakil ketua Abdul Jalil, SH, M.SP Komisioner Meyssalina M.I Arnan, S.Sos, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Drs. Robinson Simbolon
- 10** *Coffee Morning* Mengoptimalkan Tupoksi Statistik Sektor dan Sinergitas Data Statistik di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 15** Menerima Silaturahmi Dosen UINSU Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA

- 16** Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 (MAPN 4) Medan
- Mendampingi Sekda Provsu Menerima Kunker Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Studi Banding dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- 17** Menerima Audiensi Kepala Dinas Kominfo Kab. Humbang Hasundutan
- Menghadiri Acara Pembukaan Rakorda LPSE ke-4 se-Sumatera Utara Hotel Grand Mercure Medan
- Menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- 18** Menghadiri Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program dan Koordinasi Pemahaman, Urgensi, Penyusunan RP3KP dan Forum Sinkronisasi Pendataan Perumahan Provsu
- Narasumber Rapat Koordinasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se Sumatera Utara Hotel Grand Mercuri Medan
- Narasumber Rapat Pusat dan Daerah dalam rangka Asistense dan Supervisi Pelayanan Publik NSPK Urusan Komunikasi Informatika
- 19** Menghadiri Rapat Ikatan Alumni Universitas SUMatera Utara
- Penutupan Rapat Koordinasi Daerah Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- 22** Memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017
- 24** Menerima Unjuk Rasa Satuan Penarik Becak Motor

- 26** Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 29** Membuka Sarasehan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
- Mendampingi Wagubsu Audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pelopor Pemberantas Korupsi Kolusi Nepotisme Judi dan Narkoba
- 31** Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Diskominfo Provsu
- Silaturahmi dan Buka Puasa bersama Masyarakat Kelurahan Martubung dalam rangka Safari Ramadhan 1438 H

JUNI

- 8** Mendampingi Gubernur Sumatera Utara Menerima Kunjungan Duta Besar Taiwan
- 9** Membuka Pengajian Rutin Bulan Ramadhan Diskominfo Provsu
- Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provsu dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 12** Narasumber Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Deli Serdang
- Menerima Kunjungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera dalam rangka Sosialisasi Syariat Zakat
- 14** Membuka Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Serdang Bedagai

- 16** Memimpin Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Kerja Proyek Perubahan dalam rangka Diklat PIM Tingkat I Angkatan XXXVII
- 17** Silaturahmi dan Buka Puasa bersama Masyarakat Kabupaten Batubara
- 19** Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke 60 Tahun kepada Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH
- 20** Memimpin Rapat Penyusunan Proyek Perubahan dalam rangka DIKLAT PIM Tingkat I

- Menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Menghadiri Forum Diskusi Keterbukaan Informasi Publik dan Buka Bersama KIP Sumut
- 21** Penandatanganan Berita Acara Fakta Integritas antara Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Kominfo Provsu
- 30** Menghadiri Ulang Tahun (Milad) yang ke-53 Tahun Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si





APRIL

85.059 Siswa SMK di Sumut Ikuti Ujian Nasional

Medan, Sebanyak 85.059 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2017, Senin (3/4).

Dari jumlah itu, 60.376 siswa di 499 SMK, mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sementara 24.683 siswa di 400 SMK mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Hal itu disebutkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga ketika meninjau pelaksanaan UN SMK di beberapa sekolah, diantaranya SMK Negeri 10 Medan dan SMK Negeri 8 Medan.

"Kita berharap pada tahun 2018 sudah dapat terlaksana UNBK di Sumatera Utara mencapai 100%, artinya di semua SMK di Sumut," kata Hasban Ritonga.

Dari peninjauannya, Hasban mengatakan pelaksanaan UN SMK berjalan lancar. Dia memberi semangat agar para siswa menghadapi ujian dengan tenang dan berdoa.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MIHD. FITRIYUS, SH, MSP
Meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer SMK Negeri 8 Medan
Jln. Dr. Mansyur SMK Negeri 8 Medan, Senin 3 April 2017





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Menghadiri Dialog Interaktif Gubernur Sumatera Utara dengan Ketua KPK
LPP TVRI Sumut, Rabu 5 April 2017





Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Gubsu: Mari Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sehat

Medan. Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi ini sangat bermanfaat dan penting dilakukan. "Pemprov Sumut dan kabupaten/kota di Sumatera Utara akan terus mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara," kata Tengku Erry usai penandatanganan komitmen bersama dalam acara Rapat Koordinasi, Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (06/04).

Hadir Pimpinan KPK, yakni Wakil Ketua KPK Ijen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Nurlhajizah Marpaung, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Kepala LKPP RI Agus Prabowo, Kapolda Sumut Ijen Pol Rycko Amelza Dahniel, Pimpinan DPRD Sumut, mewakili Kajatisu, unsur FKPD Provsu, Kepala BPK Perwakilan Provsu Sumatera Utara, Kepala BPKP Provsu, segenap jajaran pemerintah provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Walikota seSumut, pimpinan DPRD kab/kota dan undangan.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry juga mengungkapkan bahwa pilaknya memiliki komitmen yang kuat agar tata kelola pemerintahan sehat, berjalan dengan baik dan bergerak dengan semestinya. Hari ini, kami bersama 18 kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani komitmen bersama tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Sumatera Utara. Jadi jangan coba-coba korupsi dan menyalahgunakan wewenang, sebut Tengku Erry. Sementara, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan, pencegahan penindakan korupsi terintegrasi ini adalah grand strategi yang dibuat KPK periode sekarang ini. Terintegrasi, kata Basaria, supaya tidak terjadi lagi hal yang sama di suatu tempat yang sama. Di Indonesia ada 6 provinsi yang menjadi fokus KPK.





Dihadiri Gubernur Sumut, Ketua KPK Ceramah di USU

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengapresiasi ceramah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait penguatan kelembagaan. Komitmen seorang kepala daerah menjadi poin penting untuk penguatan tersebut khususnya di provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti kegiatan Ceramah Ketua KPK RI Agus Rahardjo tentang Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Kampus USU, Jumat (07/04).

Hadir diantaranya Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) USU Todung Mulia Lubis, Rektor USU Prof Runtung Sitepu, tokoh masyarakat RE Nainggolan, sejumlah Dekan. Sementara Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo H. M. Fitriyus, Kepala Bappeda Irman, Plt Kabiro Humas Ilyas Sitorus dan Kabag Humas Indah DK. Dalam ceramahnya, Agus menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara massif, bukan hanya penegak hukum saja.

Disebutkannya, dalam kutipan kalimat Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 1961, mengatakan 'Jangan dibiarkan Korupsi menjadi bagian Budaya Indonesia'. Diakuinya memang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada angka 37 atau di ranking 90 dunia, jauh berada di bawah Singapura dan Malaysia dengan nilai 84 dan 49. Namun jika dilihat dari trend sejak 1991, grafiknya menunjukkan perkembangan positif dari nilai sebelumnya 17. Dikatakannya dalam rangka reformasi birokrasi, perlu diterapkan beberapa hal diantaranya Right Sizing atau menghilangkan tumpang tindih, membangun budaya kerja, kinerja dan sinergi, perbaikan pengawasan internal serta renumerasi diperbaiki. "Kalau seluruh masyarakat mendukung upaya KPK ini, negara sejahtera tidak terlalu lama akan tercapai," sebutnya. Sementara Ketua MWA USU Todung Mulia Lubis menyebutkan bahwa korupsi sudah dideklarasikan sebagai musuh bangsa. Menurutnya kehadiran KPK sebagai wujud belum mampunya lembaga hukum yang ada untuk membersihkan pemerintahan dari persoalan korupsi.

"Kita harus mencontoh Korea Selatan, mereka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan sosial. Karena gerakan yang dibangun pemerintah tidak selamanya berhasil," sebutnya. Sebelumnya Tengku Erry Nuradi menyayangkan OTT yang terjadi di jajarannya. Menurutnya hal ini membuat nama baik Pemprov Sumut yang bersusah payah mengembalikan kepercayaan masyarakat, menjadi sedikit tercoreng.

"Kondisi ini tentu mencoreng wajah Sumut kembali. Sementara kita sudah kembali membangunnya dari nol agar nama Sumut kembali baik di mata nasional. Bahkan kita sudah buat sejumlah perubahan-perubahan dan terobosan, baik dalam mengelola APBD, administrasi pemerintahan. Tapi hal-hal di masa lalu harus terulang lagi. Jadi saya sangat kecewa," kata Tengku Erry yang telah membangun komitmen anti korupsi sejak setahun lalu, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun kabupaten/kota.

Dengan peristiwa ini, dirinya kembali mengingatkan kepada seluruh SKPD Sumut agar bekerja dan melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku. "Saya ingatkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumut, jangan lagi ada yang melanggar hukum dalam bekerja dalam melayani masyarakat. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji di masa lalu. Kalau itu masih dilakukan siap-siaplah kalian mendapat ganjaran hukumnya, seperti yang yang terjadi saat ini," ujarnya.

Kepada oknum pimpinan SKPD Sumut yang melakukan perbuatan melanggar hukum, kata Tengku Erry, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. "Kalau memang nanti sudah jelas pejabat tersebut melakukan pelanggaran hukum tentu bisa saja akan ada pemberhentian dirinya sebagai PNS Pemprov Sumut. Dalam pemberhentian seorang PNS yang melanggar hukum tentu ada UU yang mengatur. Jadi kita lihat aja dulu perkembangan kasusnya. Jika sudah terbukti tentu surat pemecatan sebagai pejabat PNS akan ada nanti," katanya.

Gubsu Erry Akui Kompetensi ASN Pemprov Kurang Optimal

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyebutkan, mayoritas sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) masih memiliki kompetensi yang kurang optimal. Akibatnya, kinerja pelaksanaan program-program pelayanan publik di instansi pemerintah rendah.

"Ini perlu kita tingkatkan. Salah satunya dengan pelatihan-pelatihan," cetus Tengku Erry pada pembukaan Diklat Kepemimpinan tingkat III Angkatan X dan Kepemimpinan tingkat IV Angkatan X di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Jalan Ngalengko Medan, Senin (10/4).

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry mengatakan kinerja pelayanan publik sampai saat ini masih ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kurang optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. "Dengan kata lain masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara kinerja PNS yang diharapkan dengan kinerja nyata," sebut Tengku Erry.

Oleh karena itu Tengku Erry berharap peningkatan kompetensi aparatur pemerintah merupakan kunci utama dalam melakukan transformasi kinerja pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan kompetensi ini sangat diperlukan bagi pemerintah saat ini. "Organisasi dengan kinerja yang baik harus memperhatikan 4 unsur diantaranya proses, orang (SDM), teknologi dan kepemimpinan. Keempat unsur ini bekerja secara simultan dimana kunci penggerak utamanya ada pada peran SDM," jelas Tengku Erry.

Untuk itu Tengku Erry menegaskan kedepan mengelola SDM tidak dapat lagi dengan menggunakan paradigma lama yaitu menganggap SDM sebagai tenaga kerja, namun saat ini SDM harus dikelola sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. "Hal inilah yang menyebabkan pentingnya manajemen SDM," jelasnya. Fungsi inilah yang wajib diemban oleh para PNS/ASN, tidak terkecuali nantinya oleh peserta diklat. "Oleh karena itu saya berharap saudara dapat mengikuti dan mengaplikasi hal-hal yang diperoleh pada diklat ini dengan sungguh-sungguh," ungkapnya.

Lebih lanjut Tengku Erry juga menjabarkan jumlah pejabat struktural di lingkungan Provsu bulan Maret 2017 yakni PNS Eselon II jumlah 54 orang, PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK II sebanyak 16 orang (29,65), yang belum 38 orang (70,35), PNS eselon III jumlah 418 orang dan PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK III sebanyak 264 orang (63,15) yang belum 154 orang (36,8 %) , dan eselon IV jumlah 1211 orang yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK IV sebanyak 194 orang (16,01 %) yang belum 1.017 orang (83,99%). "Ini menjadi tantangan bagi kita dalam peningkatan kompetensi SDM aparatur, terutama mengenai sistem manajemen diklat kepegawaian yang professional dan handal dalam melaksanakan praktik manajemen kepegawaian yang seutuhnya," jelas Tengku Erry.

Sementara Kepala Badan Pengembangan SDM Provsu Bonar Sirait menjelaskan Diklat PIM Tk III untuk jabatan administrasi (Pejabat eselon III) bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pim Tk IV untuk jabatan pengawas bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksanaan.





Wagubsu Tinjau Hari Pertama UNBK SMA/ MA

Medan, Wagubsu Dr. Hj. Nurajizah Marpaung, SH, MH meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Tahun Pelajaran 2016/ 2017 di hari pertama SMA/MA pada sejumlah sekolah di Kota Medan, Senin (10/4).

Wagubsu didampingi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Ibnu Sri Hutomo, Ketua Komite Assyad Lubis dan Ketua Dewan Pendidikan Sumut Prof. Syaiful Sagala tiba pukul 07.00 WIB langsung disambut Kepala Sekolah SMA Negeri I Medan Dra Hj. Safrini MPd.

Di SMAN 1, Wagubsu hanya membuka pelaksanaan UNBK yang diikuti sebanyak 658 siswa. Kemudian, Pukul 09.45 WIB, Wagubsu melanjutkan ke Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendhar) diawali berdialog langsung dengan para siswa yang akan melaksanakan ujian di gelombang ke dua. Di sekolah ini, diikuti 191 siswa.

Dalam dialognya, Wagubsu menyarankan agar kita selalu sehat karena ini modal utama. Di samping itu, dalam menjalankan ujian, harus tenang, teliti dan selalu berdoa.

"Ujian itu belum ada apa-apanya karena kita sudah belajar 3 tahun. Ujian ini hanya mengecek sejauh mana anak-anak bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru," ujar Wagubsu.

Dia juga berpesan agar setelah lulus jangan santai dan senang dahulu, tetapi tetaplah belajar untuk ujian-ujian selanjutnya.

"Selamat melaksanakan ujian dan semoga anak-anak lulus semua," ujarnya.

Usai meninjau UN di 2 sekolah, Wagubsu menyampaikan bahwa pelaksanaan UNBK yang disebut dengan Computer Based Test (CBT) pada hari pertama di Sumut, khususnya di Kota Medan berjalan cukup lancar dan aman.

Wagubsu Terima Kunker Setjen WANTANNAS

Medan, Wagubsu Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH menerima kunjungan kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang dipimpin Deputy Politik dan Strategi Irjen Pol Drs Tjetjep Agus S MM MH di Ruang Beringin Lantai 8 Kantor Gubsu, Medan, Senin (10/4). Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintah Jumsadi Damanik, para pejabat SKPD Pemprovsu, Pembantu Deputy Bidang Nasional Setjen Wantannas Brigjen Pol Iwan, Pembantu Deputy Polstra Bagian Strategis Nasional Marskal Pertama Bayu Resto dan rombongan serta dari Badan Otorita Danau Toba. Dalam sambutannya, Wagubsu mengemukakan kondisi makro sosial dan ekonomi di Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya berdasarkan data indikator makro sosial ekonomi, ke depan diprediksi ekonomi Sumut dapat tumbuh jauh lebih baik, salah satunya melalui pengembangan kawasan Danau Toba yang menetapkan Toba dan sekitarnya menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. "Presiden RI Jokowi ingin menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia," ujar Wagubsu. Dengan adanya pengelolaan kawasan Danau Toba tentunya mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan terbukanya kesempatan kerja baru melalui investasi dengan memperhatikan kearifan lokal budaya setempat.

"Semoga melalui pengembangan kawasan Danau Toba dapat mengangkat kearifan lokal di Sumut," ujar Wagubsu. Sementara itu Tjetjep Agus menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan tentang pengembangan kawasan Danau Toba yang masyarakat diharapkan ikut berperan serta dalam perkembangannya. "Apalagi kita ketahui bersama, Provinsi Sumut mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar sehingga tentunya dapat lebih memajukan daerah. Namun di samping itu juga diperlukan sumber daya manusianya agar dapat mengelola potensi daerah dengan baik," ujar Tjetjep Agus



KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDULAZIZ BATUBARA, S.Sos, M.AP
Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Pemred Metro Online
Ruang Kerja Wagubsu, Selasa 11 April 2017





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Menyerahkan 6 orang Tenaga Pendukung Diskominfo Provsu untuk Diperbantukan ke Biro Humas dan Keprotokolan Provsu
Ruang Rapat Kerangka Kantor Gubsu, Kamis 13 April 2017



KABID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
 Menghadiri Dialog Khusus dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke 69 Tahun 2017
 Stasiun LPP TVRI Medan, Kamis 13 April 2017





Tengku Erry Ziarahi Makam Mantan Gubernur Sumatera Utara

Medan, Memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) ke-69, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menziarahi makam para Gubernur Sumatera Utara pendahulu antara lain Marah Halim Harahap, Raja Inal Siregar dan Tengku Rizal Nurdin, Senin (17/4).

Ziarah dimaknai sebagai ungkapan terimakasih dan penghargaan atas gubernur terdahulu yang telah berjasa ikut memajukan Sumatera Utara.

Tengku Erry didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahmiel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Wagubsu Hj Nurhajizah, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Sekda Provsu Hasban Ritonga, dan rombongan mengawali kegiatan ziarah di Makam Pahlawan Jl. Sisingamangaraja.

Ziarah dilanjutkan kompleks Pemakaman Masjid Raya Al Mashun Medan dimana makam Alm HT Rizal Nurdin yang merupakan kakak kandung Tengku Erry.

"Hari ini dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Utara, bersama unsur pimpinan daerah, Kepala SKPD, tokoh masyarakat dan ormas berziarah untuk mengenang jasa para mantan Gubsu dan tokoh Sumut. Sebagai bangsa yang besar kita harus mengenang jasa para pendahulu," ujar Tengku Erry usai memimpin ziarah.

Sumatera Utara bisa menjadi seperti saat ini, menurut Tengku Erry, tidak terlepas dari sejarah panjang. Peranan para Gubernur dan tokoh masyarakat ikut memberi kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan dan kemajuan Provinsi berbilang kaum Sumatera Utara.

"Para gubernur sebelumnya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan berbagai kelebihan dan prestasi yang patut dijadikan pelajaran dan contoh," kata Tengku Erry seraya mengatakan, dirinya menjadikan para gubernur sebagai suri tauladan dalam menjalankan amanah memimpin Sumatera Utara.

Kegiatan ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan dan diikuti dengan mengheningkan cipta. Tengku Erry meletakkan karangan bunga pada tugu yang berada di pusat makam pahlawan.

Selanjutnya, Tengku Erry diiringi para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menziarahi makam mantan Gubsu Raja Inal Siregar dan makam Gubsu periode 1966-1977 Marah Halim. Rombongan juga menziarahi mantan Pangdam I Bukit Barisan H. Abdul Manaf Lubis. Pada setiap makam Gubsu mengawali dengan penghormatan dan tabur bunga di pusara serta berdoa.

Usai ziarah di makam pahlawan, rombongan melanjutkan kegiatan ziarah ke kompleks pemakaman Masjid Raya Al Mashun Medan. Tengku Erry memimpin tabur bunga dan doa di pusara Alm H T Rizal Nurdin yang tewas pada kecelakaan pesawat udara Mandala Air saat menjabat sebagai Gubsu.



Gubsu Tengku Erry: Melalui Verifikasi, SPS Harus Wujudkan Good Media

Medan, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, M.Si membuka pelaksanaan Workshop Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak se-Sumatera Utara di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (17/04). Hadir mendampingi Tengku Erry, Wakil Gubernur Sumut Dr. H. Nuhajizah Marpaung, SH, MH, Kadis Kominfo Provsu Fitriyus dan Plt Kabiro Humas dan Protokol Provsu Ilyas Sitorus. Selain itu turut hadir Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Perusahaan Pers (SPS) Bambang Halilantar dan Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan, Ketua SPS Sumut Farianda Putra Sinik, dan Zaki Abdullah dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry berharap bahwa melalui Workshop yang digelar SPS dan Dewan Pers akan mendorong setiap Perusahaan Pers yang ada di Sumut demi terwujudnya Good Media. Apalagi Dewan Pers sejak lama telah mengamanatkan agar perusahaan pers melakukan verifikasi sebagaimana yang diatur dalam UU Pers maupun UU perusahaan.

"Oleh karenanya kita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengapresiasi terlaksananya Workshop ini. Apalagi peserta Workshop ini yang tergabung dalam SPS merupakan para Pemred atau owner dari suatu perusahaan media,"harap Tengku Erry.

Lebih lanjut dikatakan Tengku Erry, pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) hendaknya harus sejalan dengan *Good Media*. Apalagi secara trias Politika Media massa disebut-sebut sebagai kekuatan keempat dari demokrasi selain eksekutif, legeslatif dan yudikatif. "Sebagai kekuatan keempat dari Trias Politika tentu harus hadirnya *Good Media*. Kita tidak bisa hanya berharap dari *Good and Clean Government* saja tapi juga *Good*

Media,"terang Tengku Erry. Untuk itu verifikasi terhadap perusahaan media saat diperlukan salah satunya untuk mempermudah adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

"Contoh kecilnya hari ini kami HUT Pemprovsu dan ingin memasang iklan ucapan selamat tentu hal ini akan sulit kita lakukan kerjasama kalau Perusahaan Pers yang ada belum diverifikasi. Kalau kami berikan tentu kami akan kena audit BPK karena bekerjasama dengan Perusahaan Pers yang belum diverifikasi,"pungkasnya.

Sebelumnya Ketua SPS Sumut Farianda Putra Sinik mengapresiasi kehadiran Tengku Erry dan Wagubsu pada pembukaan Workshop Verifikasi perusahaan Pers media cetak di Sumut sebagai standart perusahaan pers media cetak. Seiring dengan perkembangan media massa yang cukup luar biasa, SPS merasa berkewajiban untuk menggelar Workshop agar mendorong perusahaan Pers untuk melakukan Verifikasi kepada Dewan Pers.

Hal senada juga disampaikan Ketua delegasi kesenian Tiongkok Tong Chuan Jie bahwa sejak tahun 2009, kesenian Tiongkok sudah dilaksanakan di berbagai negara, misalnya tarian yang melibatkan orang yang sangat banyak tapi tidak mengurangi keindahan setiap gerakannya. Begitu juga dengan bernyanyi, hingga atraksi sulap. "Untuk itu saya berharap Indonesia juga bisa menampilkan keseniannya di Tiongkok, agar kita bisa saling bertukar informasi tentang kesenian masing-masing," jelasnya.

Begitu juga dengan yang disampaikan Konjen Tiongkok Zhu Honghai bahwa jalinan kerjasama antara kedua negara dapat berjalan lebih baik. Tak hanya pertukaran kesenian dan budaya juga pembangunan.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Menghadiri Jamuan Makan Siang Peringatan HUT Pemprovsu ke-69
 Rumah Dinas Gubernur, Senin 17 April 2017





KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LPSE DISKOMINFO PROVSU HERMAN SITORUS, SH, MSP
 Membuka *Workshop* Sosialisasi E- Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 Hotel Four Points Medan, Selasa 18 April 2017

Gubsu Buka Musrenbang Provinsi Sumut, Proyeksikan APBD 2018 Sebesar Rp13,32 Triliun

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. H.Tengku Erry Nuradi, MSI membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara untuk 2018 di Hotel Santika Medan, Selasa (18/04).

Hadir Wakil Gubernur Sumut Dr. Hj. Nuhajizah Marpaung, SH, MH anggota DPD RI Parliungan Purba, Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon, Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Hadi Prabowo, FKPD dan SKPD Provsu, FKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan sejumlah bupati/walikota se Sumut.

Memproyeksikan APBD 2018 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017, dari Rp 13,03 triliun menjadi Rp13,32 triliun. Hal ini untuk mendukung 10 prioritas pembangunan nasional dan mendukung pencapaian 9 prioritas provinsi. Ditahun 2018 ini kita proyeksikan mencapai Rp13,32 triliun. Dengan catatan bahwa kewajiban terhadap bagi hasil kepada Kabupaten /Kota sampai Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi. Selain untuk mendukung 10 prioritas nasional juga untuk mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi, ujar Tengku Erry.

Seperti diketahui dalam rencana kerja tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sedangkan 9 pencapaian prioritas provinsi, pertama, peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kedua, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Ketiga, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan. Keempat, peningkatan pengusahaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah. Kelima peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian. Keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Delapan, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. Dan sembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah.



Musrenbang ini merupakan momentum penting yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir dari RPJMD Provsu Tahun 2013-2018 dengan visi, menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera, ujar Tengku Erry lagi.

Sementara, Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon memberi masukan agar dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang dapat melakukan pendekatan money follows program dalam artian fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya untuk mendukung prioritas nasional Pemprovsu.

Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyeksi prioritas nasional.



Oleh karenanya Bappeda memiliki peran sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan, ujar Leonard sembari menekankan pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.

Leonard pun mengingatkan dalam pelaksanaan Musrenbang di Provinsi Sumut perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.

Sedangkan Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provsu untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan Tahun 2018 melalui Musrenbangnas. Kementerian Dalam Negeri akan melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD) dengan RPJMD dan RKP. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga akan mengevaluasi antara perencanaan dan penanggaran. Rekomendasi untuk pemerintah daerah, bahwa hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provsu. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018, ujar Hadi Prabowo.



KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDUL AZIZ BATUBARA, S.Sos, M.AP
Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Pengurus Baznas Provsu yang diketuai Amansyah Nasution
Ruang kerja Gubsu Medan, Selasa 18 April 2017



KABID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU IIj. AFINI, SE
Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Mahasiswa FISIP USU
Ruang kerja Gubsu Medan, Selasa 18 April 2017





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Bersama Juri menilai Photo Peserta Lomba Photo dan Karya Tulis dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke- 69 tahun 2017
 Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu 19 April 2017



Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH : Wujudkan Komitmen Dalam Menindak Lanjuti Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Stabat, Guna untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan ketersediaan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mensosialisasikan sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning) yang berlangsung di Aula Akper Langkat, Kamis (20/4).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin yang dihadiri oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara Drs. H. M. Fitriyus SH, M.SP, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana dan Popy Marulita Hutagalung dari Bappedasu serta perwakilan unsur Forkopimda Langkat.

Bupati Langkat melalui pidato tertulisnya yang disampaikan Sekda Indra, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, penerapan E-Planing masih dalam tahap sosialisasi yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menindaklanjuti Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi yang terintegrasi di Sumatera Utara antara KPK RI, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Ada 10 Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi yang terintegrasi tersebut, diantaranya melaksanakan proses penganggaran yang mengakomodir kepentingan public, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi E-Planing dan E-Budgeting" kata Bupati.

Kepala Bappeda Langkat H. Sujarno melaporkan, kegiatan sosialisasi ditujukan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan kepada Aparatur Pemerintah dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi E-Planing yang berbasis elektronik secara transparan dan akuntabel.

Kemudian, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan ketersediaan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan menuju Pemerintahan yang baik dan bersih.

Peserta sosialisasi terdiri dari seluruh Kepala SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, Camat se-Kabupaten Langkat, 2 orang Lurah/Kepala Desa perwakilan setiap Kecamatan serta 1 orang staf perwakilan seluruh Instansi Pemerintahan di lingkungan Pemkab. Langkat.

Sebagaimana diketahui, Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara Drs. H. M. Fitriyus SH, M.SP, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana dan Popy Marulita Hutagalung dari Bappedasu menjadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut .

KADIS KOMINFO PROSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Menerima Audiensi Tribrata News Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Ruang Kerja Kadis Kominfo Prov. Sumut, Kamis 20 April 2017







KADIS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Membuka Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
 Auditorium RRI Medan, Rabu 26 April 2017



Darto /Bayan

SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Memberikan Hadiah kepada Pemenang Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota se Sumatera Utara
Auditorium RRI Medan, Rabu 26 April 2017





PEMBUKAAN LOMBA KIM

Sekretaris Diskominfo Provsu M. Ayub, SE membacakan pidato sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara Pembukaan Lomba KIM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara didahului oleh laporan Ketua Panitia Lomba KIM yang disampaikan oleh Kepala Bidang PIP Diskominfo Provsu Afini, SE. Aula RRI Medan, Kamis 27 April 2017

Menpan RB dan Gubsu Resmikan E Government Kabupaten Pakpak Bharat

Pakpak Bharat: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Dr Asman Abnur SE MSi dan Gubernur Sumut Ir. H. Tengku Erry Nuradi, MSi menghadiri peluncuran tujuh aplikasi e-Government Pemkab Pakpak Bharat di Gedung BKD Pakpak Bharat Salak, Cikaok Kamis (27/04).

Selain peluncuran aplikasi E Government, Menpan RB dan Gubsu turut meresmikan sarana prasarana Computer Assisted Test (Cat) System di Balai Diklat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Adi Suryanto M.Si, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Ketua BKD Provsu Kaiman Turnip, Kadiskominfo Fitriyus, Kabiro Humas Ilyas Sitorus, dan unsur FKPD Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam sambutannya Menpan RB Asman Abnur mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemkab Pakpak Bharat. Menurutnya setiap perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak selamanya perubahan itu di mulai dari Jakarta. "Perubahan itu bisa dilakukan asal pemimpinnya punya komitmen dalam memimpin. Saya melihat Bupati Pakpak Bharat cukup berkomitmen. Walau kabupatennya masih muda, saya harapkan dapat menjadi role model bagi Kabupaten Kota lain yang ada di Sumut,"ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menpan RB juga mengingatkan agar para ASN di Pakpak Bharat mendukung komitmen Bupati dengan bekerja sebaik mungkin agar inovasi yang dilakukan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Saya sering bilang sama seluruh pejabat jangan sia-siakan

waktu selagi memiliki jabatan. Jangan terlena, jangan terjebak dengan kegiatan seremonial. Jangan nanti setelah pensiun baru menyesal karena belum membuat hal-hal yang terbaik,"jelasnya.

Sementara itu Kepala LAN RI Adi Suryanto mengaku senang atas terselenggaranya launching aplikasi E-Government di Pakpak Bharat. Meskipun sempat tertunda namun dirinya bersyukur bahwa Pakpak Bharat telah melakukan 54 inovasi untuk pelayanan publik berbasis IT. Dirinya pun berharap Pakpak Bharat dapat menjadi laboratorium Inovasi dan menjadi model bagi LAN,"ujarnya.

Sementara itu Gubsu mengapresiasi bahwa dari seluruh Kabupaten di Sumut Pakpak Bharat yang pertama memiliki aplikasi E-Government selain Kota Medan dan Binjai. "Ini bukti dari keseriusan dalam hal peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi dan komunikasi. Hal ini muaranya tentu agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dan mengakses pelayanan publik,"ujarnya.

Sementara itu Remigo menjelaskan ada tujuh aplikasi E-Government yang diluncurkan yaitu aplikasi e-Surat, aplikasi Simral (e-Planing dan e-Budgeting), aplikasi JDIH, aplikasi e-Kinerja, aplikasi e-SSH, aplikasi SAPA, dan aplikasi PPID.

Dalam penjelasannya, tujuh aplikasi tersebut cukup membantu kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, perencanaan pembangunan melalui aplikasi Simral dan aplikasi e-SSH, serta saat masyarakat membutuhkan informasi berupa produk hukum atau informasi tentang pemerintah lainnya dapat diakses melalui aplikasi PPID dan JDIH

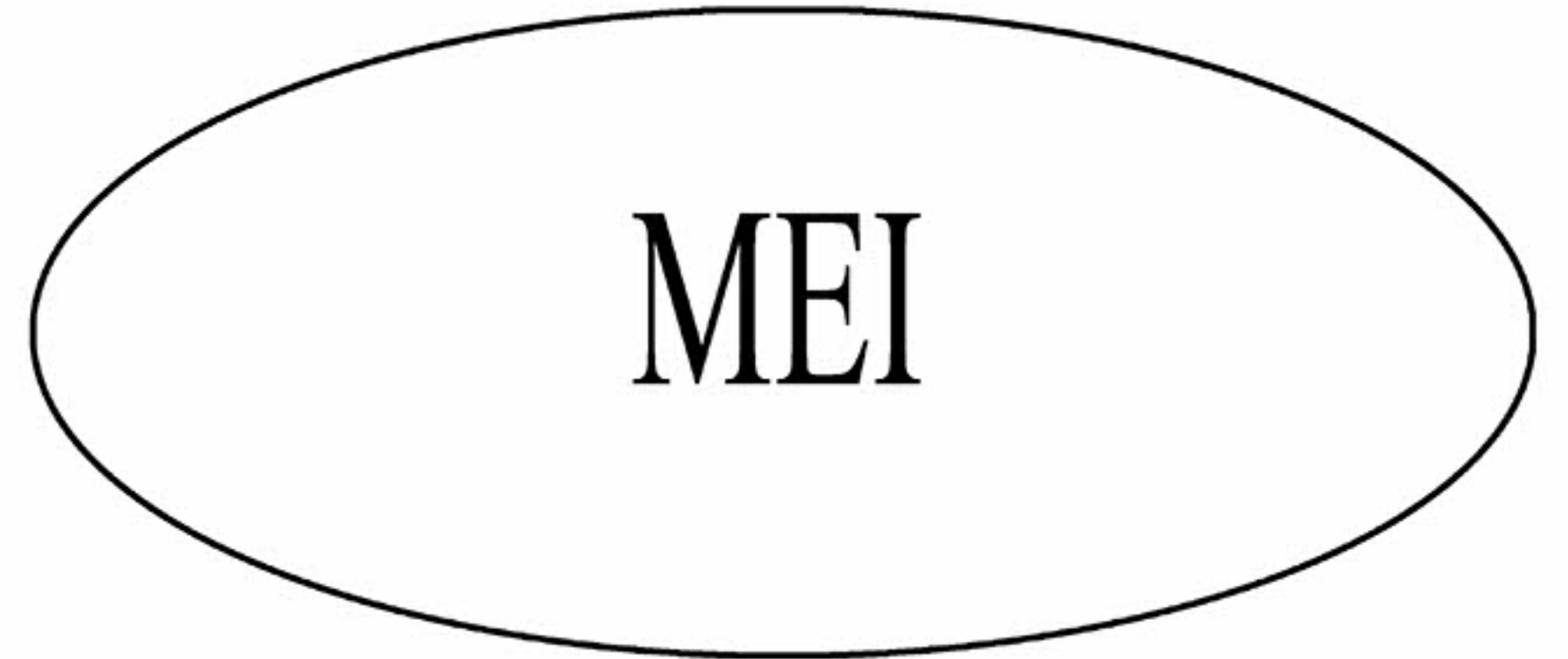




PENYERAHAN HADIAH

Para Juara Lomba KIM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yaitu Juara I dari KIM Kota Tanjung Balai, Juara 2 dari KIM Kota Medan, Juara 3 dari KIM Kabupaten Simalungun, Juara Harapan I dari KIM Kota Tebing Tinggi, Juara Harapan 2 dari KIM Kabupaten Labuhan Batu dan Juara Harapan 3 dari KIM Kabupaten Humbang Hasundutan. Hadiah diserahkan langsung kepada para Pemenang oleh yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Diskominfo Provsu M. Ayub, SE, Para Juri, Kepala Bidang PIP Diskominfo Provsu Afini, SE dan Kasi Informasi Publik Diskominfo Provsu Dra. Efi Zamita, M.Si.

Aula RRI Medan, Kamis 27 April 2017



KEPALA SEKSI INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU Dra. EFI ZARNITA, M.Si
Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Badan Otoritas Danau Toba
Ruang Kerja Wagubsu, Selasa 2 Mei 2017





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Memimpin Rapat Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provsu
Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Selasa 2 Mei 2017

Puslitbang Kemenkominfo kunjungi Diskominfo Provsu

Medan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE menerima audiensi Kepala Pusat Penelitian Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Budi Setiawan dan staff di Ruang kerja Kadis Kominfo Provsu, Rabu (03/05).

Kadis Kominfo Provsu mengapresiasi audiensi yang bertujuan untuk meneliti kesadaran (Social Awareness) masyarakat terhadap keamanan sistem informasi. Beliau mengharapkan adanya pelaksanaan workshop untuk keamanan sandi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam kesempatan itu Kepala Bidang Layanan E-government Diskominfo Provsu Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si menambahkan bahwa saat ini Diskominfo sudah mempunyai infrastruktur seperti ruangan server yang ada di lantai 6 Kantor Gubernur Sumut.

Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Abdul Aziz, S.Sos, M.AP dan Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi Thamrin Dedy Sunarto, ST. (LIP)





Wagubsu: Kegiatan Penas Harus Dimanfaatkan untuk Kemajuan Petani-Nelayan

Aceh, Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Hj. Nurhajizah, SH, MH dan Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Evi Diana Erry Nuradi memberi suport kepada kontingen Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan asal Sumut yang berjumlah 1.692 peserta. Penas Petani Nelayan ke-XV tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh pada 6-11 Mei 2017 itu dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Sabtu (6/5). "Kegiatan Pekan Nasional petani dan nelayan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan petani dan nelayan kita," ujar Nurhajizah kepada kontingen Penas Sumut.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Kontingen Sumut Ibnu S Hutomo, Kepala Dinas Kehutanan Harlen Purba, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut M Azhar Harahap, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Dahler, Kadis Perkebunan Sumut Herawaty dan anggota kelompok tani dan nelayan. Wagubsu mengingatkan, Penas sebagai forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan yang berprestasi, peneliti, universitas dan pemerintah agar dimanfaatkan dengan baik oleh kontingen sehingga dapat meningkatkan motivasi petani dan nelayan agar semakin berprestasi.

Karenanya Wagubsu meminta, kontingen Penas Sumut dapat memanfaatkan Penas sebagai wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antarpetani, nelayan, petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah. Usai Setelah mengikuti acara pembukaan, Wagubsu dan Evi Diana berkunjung ke stan Sumut pada Pameran Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Nasional di Stadion Harapan Bangsa. Dalam pameran itu, Sumut menampilkan berbagai produk andalan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kelautan. Lebih dari seratus jenis produk andalan Sumut ditampilkan mulai dari hulu atau tanaman sampai hilir yaitu produk olahan. Untuk mengisi berbagai produk yang ditampilkan Pemerintah Provinsi melibatkan kabupaten/kota se Sumut.

Dalam kunjungannya ke stan Pameran, Wagubsu dan Evi Diana memperhatikan produk-produk yang dipamerkan. Keduanya juga mencoba berbagai jenis olahan seperti sirup buah dan kopi serta berbagai panganan. Nurhajizah memuji beberapa produk yang menurutnya bisa bersaing jika dipasarkan dengan baik. Keduanya juga melakukan dialog dengan seorang petani kopi Ludiantoni Manik asal Kabupaten Simalungun yang tidak saja menanam kopi namun juga berhasil mengolah dan memproduksi kopi kemasan.

Manik menjelaskan bahwa produk kopi merk Saabas jenis Arabika Sumatra Simalungun yang sudah terdaftar sebagai salah satu indikasi geografis oleh komite agreditasi nasional. Ditambahkan Herawaty, untuk jenis kopi saat ini Sumut sudah memiliki dua produk indikasi geografis yang yaitu Arabika Sumatra mandailing dan Arabika Sumatra Simalungun. Nurhajizah dalam kesempatan itu meminta kepala SKPD terkait agar mendorong produk pertanian perkebunan dan perikanan Sumut dapat menembus pasar ekspor karena memiliki kualitas yang baik.

"Dengan pasar yang lebih luas hingga ke manca negara, maka petani dan nelayan Sumut akan semakin sejahtera begitu juga negara mendapat devisa," kata wagubsu.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD FITRIYUS, SH, MSP
Mendampingi Gubsu Menerima Audiensi Partai Berkarya Sumatera Utara
Ruang Kerja Gubsu, Senin 8 Mei 2017





Rusia Undang Gubsu Hadiri Festival Indonesia di Moskow

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyambut baik undangan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow untuk Rusia dan Republik Belarus. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) diminta berpartisipasi pada acara Festival Indonesia atau Trade, Tourism Investment (TTI) pada 4-6 Agustus 2017 mendatang di Kota Moskow, Rusia.

Menurut Tengku Erry, PemprovSU akan memanfaatkan moment tersebut untuk mempererat hubungan kerjasama maupun mempromosikan pariwisata dan investasi di berbagai sektor di Sumatera Utara. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan bapak Wakil Duta Besar dan juga rombongan pada hari ini. Tentunya kami akan memanfaatkan kegiatan TTI untuk membawa potensi ada di Sumut untuk diperkenalkan di sana," ujar Gubsu saat menerima Wakil Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, Lasro Simbolon di ruang kerjanya Lantai X Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Tengku Erry juga menyambut baik niat pengusaha dari Republik Belarus yang tertarik berinvestasi di Sumut. Menurut Gubsu dengan potensi sumber daya manusia yang cukup besar dan juga wilayah serta kekayaan alam yang berlimpah tentu Sumut merupakan pasar investasi yang cukup baik. Belum lagi letak geografis Sumut yang jaraknya berdekatan

negara tetangga. "Selama ini kita cukup mengenal Moskow maupun Rusia namun mungkin belum ada kerjasama yang terjalin dengan PemprovSU selama ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dan kegiatan TTI nantinya akan berlanjut dengan terjalinnya kerjasama," harap Tengku Erry.

Dijelaskan Tengku Erry, Sumut memiliki potensi perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Selain kelapa sawit Sumut juga terkenal dengan karet, tembak, teh dan kopi. "Tadi saya dengar bahwa salah satu bidang usaha pak Viktor adalah karet. Ini sangat baik sekali. Kami menawarkan membangun pabriknya disini. Karena marketnya disini cukup besar. Kita juga punya kawasan industri Sei Mangke untuk Kelapa Sawit dan karet serta pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan pelabuhan Hub internasional," terangnya.

Saat ini pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Sumatera Utara dan tercatat eram kali Presiden tahun ini berkunjung ke Sumut untuk meninjau sejumlah proyek strategis nasional. Selain investasi pembangunan jalan tol maupun pembangkit listrik menurut Gubsu investor juga dapat memanfaatkan sektor pariwisata seperti halnya di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata dunia.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Mendampingi Gubsu Menerima Audiensi YKBJAI
 Ruang Kerja Gubsu, Senin 5 Mei 2017





Kadis Kominfo Provsu Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP didampingi Sekretaris Dinas Kominfo H. M. Ayub, SE, menerima audiensi Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provsu H.M. Zaki Abdullah di dampingi Wakil ketua Abdul Jalil, SH, M.SP Komisioner Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Drs. Robinson Simbolon ruang rapat Kadis Kominfo Provsu. Selasa, (09/05).(PIP)



Diskominfo Provau Coffee Morning Bersama Stakeholder

Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan acara Coffe Morning bersama Stakeholder di Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu (10/05).

Pertemuan ini menjadi upaya untuk mensosialisasikan keberadaan Dinas Kominfo Provsu yang berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan sebagai pengolah data Statistik terutama pada bidang Sektoral yang sebelumnya berada di Bappeda Provsu.

Untuk itu tujuan dilaksanakannya acara coffe morning ini adalah untuk mensinergikan informasi terkait dengan statistik bersama dengan jajaran tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Kadis Kominfo Provsu Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP didampingi Kabid PKP Abdul Aziz Batubara, S.Sos, M.AP menjelaskan "Bahwa bidang statistic merupakan merupakan tugas utama pada domain Pemerintahan Daerah juga disebut data sektoral sebagai kajian, jika melihat UU 23 Tahun 2014 ada kewenangan kontemporer yang menyangkut bidang statistic sektoral yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk dikelola bersama sebagai urusan wajib Pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan tidak dasar. Untuk itu perlu diinformasikan bahwa tugas Dinas Kominfo merupakan Pengelolaan data Statistik bidang Sektoral. Saat ini Kendala yang sulit dihadapi adalah menyatukan data informasi", ujar Kepala Dinas Kominfo Provsu.

Kadis Kominfo menambahkan "Untuk pengumpulan data akan menjadi fokus kerja Diskominfo Provsu Tahun 2017 dan kedepannya akan melakukan yaitu 1. Kegiatan kerjasama BPS dan Dinas Kominfo Provsu pengumpulan data yang akan disampaikan dengan masyarakat. 2. Pembagian tugas pengelolaan data Statistik antara BPS dengan Dinas Kominfo Provsu tentang kegiatan-kegiatan & informasi yang sifatnya apakah temporer atau untuk keperluan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah. 3. Membentuk forum data untuk mewujudkan kumpulan data polis kebijakan 1 data. 4. Membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Sekda ditunjukkan oleh seluruh SKPD Provsu untuk menyampaikan data secara regular Diskominfo.

Sementara itu Bobs Setiabudi, S.si, M.si Kabid Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada BPS Provsu yang berperan sebagai Narasumber mengatakan bahwa Statistik ada 3 yaitu Statistik Sektoral, Statistik Dasar dan Statistik Khusus. Statistik Sektoral berada pada Instansi/Dinas jajaran Pemprovsu ini bisa dilakukan melalui survey data namun tetap harus ada rekomendasi dari BPS Provsu untuk selanjutnya dapat turun ke lapangan.

Dengan lahirnya SOTK baru didalamnya diamanatkan Statistik Sektoral merupakan kewenangan Diskominfo Provsu, untuk kedepan seluruh data dari SKPD jajaran Pemprovsu akan dikoordinir dan dikompilasi oleh Dinas Kominfo Provsu yang selanjutnya data tersebut akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan BPS Provsu.

Begitu juga untuk dengan SKPD yang ingin memperoleh rekomendasi harus tetap melalui Dinas Kominfo Provsu untuk diteruskan ke BPS Provsu.

Turut hadir pada acara tersebut ialah seluruh perwakilan SKPD jajaran terkait, wartawan media cetak dan Elektronik. (LIP)



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Menerima Silaturahmi Dosen UINSU Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
Ruang Kerja Kadis Kominfo Provsu, Senin 15 Mei 2017



KASI INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU Dra. EFI ZARNITA, M.Si
Mendampingi Wagubsu Menerima Audiensi Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 (MAPN 4) Medan
Ruang Kerja Wagubsu, Selasa 16 Mei 2017



Sumut Percontohan e-Planning dan e-Budgeting

Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan program e-Planning dan e-budgeting Pemprov Sumut menjadi contoh atau model bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. "Jika selama ini Surabaya kita rekomendasikan sebagai contoh tingkat kota, maka kini Sumut kita rekomendasikan sebagai contoh untuk tingkat provinsi dalam program e-Planning dan e-Budgeting," ujar Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution yang sering disapa Choki.

Hal itu dikemukakannya dalam pertemuan dengan Sekdaprov Sumut H Hasban Ritonga saat menerima Tim Pemprov Sulawesi Tengah dipimpin Kepala Bappedanya dan Tim Pemprov Bengkulu, di Kantor Gubsu, di Medan, Selasa (16/5) sore.

Tim Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Bengkulu ini melakukan studi banding e-Planning dan e-budgeting ke Pemprov Sumut atas rekomendasi KPK karena aplikasi sistem dimaksud di Sumut dinilai KPK cukup baik.

Sekdaprov Sumut bersyukur Sumut sudah dinilai cukup baik oleh KPK dan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas aplikasi ini mendukung good and clean government.

Adlinsyah Nasution mengemukakan, pihaknya gembira dan terus mendorong optimalisasi program e-budgeting dan e-Planning Pemprov Sumut ini terus semakin baik sehingga provinsi-provinsi lain tidak bingung untuk studi banding, melainkan sudah ada yang baik di Sumut.

Idealnya memang untuk tingkat provinsi contoh aplikasinya dilihat di tingkat provinsi pula, sementara kota di tingkat kota dan kabupaten yang sudah baik lainnya. Dalam hal ini, tingkat kota dapat ke Surabaya dan tingkat provinsi studi banding ke Pemprov Sumut.

"Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Provinsi Sumut yang sudah berkenan menjadi tuan rumah untuk studi banding Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Saya berharap pertemuan hari ini dan workshop yang kita lakukan dapat bermanfaat baik ke depan," ujarnya.

Hasban Ritonga menyampaikan terima kasih atas dorongan KPK yang serius membimbing dan mensupervisi Sumut membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung good and clean government.

Namun dari semua itu, lanjut Sekda, diawali dengan membangun komitmen semua jajaran di Pemprov Sumut dan seluruh kabupaten/kota untuk menjadi daerah ini semakin baik dan mempersempit peluang KKN hingga sistem yang bebas KKN.

"Bapak Gubsu terus mendorong untuk dibangun komitmen bersama antara komunitas Sumut dan seluruh penda beserta masyarakat. Mudah-mudahan komitmen itu menjadi kesepakatan yang harus ditindaklanjuti agar efektif dalam implementasinya," ujarnya.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Menerima Audiensi Kepala Dinas Kominfo Kab. Humbang Hasundutan
 Ruang Kerja Kadis Kominfo Provsu, Rabu 17 Mei 2017



Rakor LPSE ke-4 Provsu Harus Mampu Wujudkan Sumatera Utara PATEN

Medan, Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH MH membuka Rapat Koordinasi Daerah Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 di Grand Mercure Maha Cipta Nomor 1 Medan, Kamis (17/5). Wagubsu mengharapkan Rakor dapat menyusun standarisasi LPSE mendukung Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK). "Saya mengharapkan Rakor LPSE ke-4 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dengan beberapa rangkaian kegiatan benar-benar menjadi salah satu pilar yang mampu mewujudkan SUMUT PATEN dengan pelaksanaan rencana aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui standarisasi LPSE," kata Wagubsu.

Hal itu sebagaimana dengan Tema Rakor yaitu "Dengan Pelaksanaan Rakorda LPSE ke-4 kita wujudkan Sumut Puyen dengan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) melalui Standarisasi LPSE". Menurut Wagubsu pada Pemerintahan saat ini telah memasuki babak baru yaitu dengan mulai diterapkannya pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik atau E-Procurement. Pelaksanaan e-procurement dilakukan secara Elektronik yang berbasis website/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelanggan umum dan pra-kualifikasi serta sourcing secara Elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

Selain itu menurut Wagubsu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan E-Procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan efektifitas serta efisiensi bahkan transparansi dan akuntabilitas. Transaksi yang dilakukan bahkan biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

Menurut Wagubsu bahwa Pengadaan barang melalui Elektronik dapat menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta keterbukaan semua orang dapat mengakses dan akan mengamankan siapapun yang terlibat didalamnya. Wagubsu mengatakan bahwa arah perubahan sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat dan efisiensi belanja negara serta mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD bahkan memperkenalkan aturan sistem dan aturan serta metode dan prosedur yang sederhana dengan tetap memperhatikan 'GOOD GOVERNANCE'.

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden pada Tanggal 6 Agustus 2010 yang merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara H MHD Fitriyus, SH, MSP. Sebelumnya Panitia Pelaksana Rakorda Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Herman SE, MSI mengatakan bahwa Rakorda dihadiri Para Pengelola LPSE Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dan LPSE Aceh, LPSE USU, LPSE Unimed, LPSE Pelindo, LPSE Kalimantan Selatan dan LPSE Kalimantan Utara.

Menurutnya bahwa Rakorda berlangsung dari Tanggal 17 s/d 19 Mei 2017 dan bertujuan untuk mengimplementasikan strategi pengadaan dan mengakses Barang dan Jasa dan Pemberitahuan kepada publik tentang LPSE serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Menghadiri Acara Pembukaan Rakorda LPSE ke-4 Se-Sumatera Utara
Hotel Grand Mercure Medan, Rabu 17 Mei 2017

Penyediaan Rumah di Kabupaten/Kota se-Sumut Wagubsu Minta Segera Wujudkan

Medan, Wagubsu Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH mengatakan bahwa kegiatan Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program dan Koordinasi Pemahaman, Urgensi, Penyusunan RP3KP dan Forum Sinkronisasi Pendataan Perumahan Provinsi Sumut adalah penting dan sangat strategis. Karena pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mensinkronkan penyediaan perumahan di kabupaten/kota se Sumatera Utara.

"Khusus untuk rumah, bukan sekedar perbaikan dan pengadaan saja, melainkan kebutuhan yang medesak," ujar Wagubsu pada acara Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program dan Koordinasi Pemahaman, Urgensi, Penyusunan RP3KP dan Forum Sinkronisasi Pendataan Perumahan Provinsi Sumut, Kamis (18/5) di Four Point Hotel Jl. Gatot Subroto Medan.

Turut Hadir Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Hardi Simamora, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir Ida Mariana, MSi, Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan Ir Pangihutan Marpaung dan peserta yang berasal dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera. Selain itu kata Wagubsu Sumatera Utara beberapa kabupaten kota rentan dengan gempa dan banjir bandang. Hal ini juga disebabkan dalam pengembangan pembangunan perumahan asal jadi tidak memperhatikan faktor lingkungan.

Oleh karenanya Wagubsu berharap dengan kegiatan ini kabupaten/kota dapat menyampaikan apa yang dibutuhkan masing-masing kabupaten/kota guna pengembangan perumahan. "Diskusikan, mumpung direktur yang berkompeten tentang itu ada disini. Sampaikan dan tanyakan bagaimana bisa didapatkan dengan cepat," ujar Wagubsu.

Ketersediaan RP3P maupun pokja-pokja di kabupaten/ kota lanjut Wagubsu, nantinya diharapkan mempermudah dalam hal pertukaran informasi kegiatan serta efektivitas koordinasi dalam memaksimalkan seluruh kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sekaligus daerah-daerah yang terkena bencana seperti tanah karo dan kota padangsiderumpun yang terkena bencana banjir bandang.

Untuk itu, Wagubsu menyampaikan kepada direktur agar dapat membantu penyediaan rumah terutama bagi daerah-daerah yang terkena bencana, khususnya Tanah Karo yang telah tiga tahun terkena bencana erupsi gunung Sinabung. "Bagaimana para pengungsi bisa hidup lebih layak," harap Wagubsu.

Wagubsu pada kesempatan itu mengaharapkan agar para peserta diskusi dari kabupaten/kota dapat menanyakan bagaimana cara agar daerahnya mendapatkan program sejuta rumah. "Tidak hanya duduk dan pulang. Namun diskusikan bagaimana syarat dan caranya bagaimana mendapatkan program itu dengan cepat," tegas Wagubsu seraya menambahkan cepat, tepat dan bisa dirasakan lebih baik.

Hal serupa juga disampaikan Kadis Tata Ida Mariana agar seluruh kabupaten segera melengkapi seluruh persyaratan yang belum terpenuhi agar program sejuta rumah bisa dirasakan di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara. "Kabupaten/kota se Sumut agar memantapkan apa yang sudah dilakukan dan segera melengkapi persyaratan program-program sejuta rumah dirasakan di kabupaten/kota se Sumut," ujar Ida.

Dia juga mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai tanggal 17-19 Mei 2017 dengan peserta berasal dari kepala Dirus PKP dan Bappeda dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Narasumber Rapat Koordinasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se-Sumatera Utara
 Hotel Grand Mercure Medan, Kamis 18 Mei 2017



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Narasumber Rapat Pusat dan Daerah dalam rangka Asistense dan Supervisi Pelayanan Publik NSPK Urusan Komunikasi Informatika
 Hotel Polonia Medan, Kamis 18 Mei 2017



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Menghadiri Rapat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU)
 Ruang Rapat Biro Rektor USU, Jumat 19 Mei 2017





KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LPSE DISKOMINFO PROVSU HERMAN SITORUS, SH, MSP
 Penutupan Rakorda Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke-4 se-Sumatera Utara
 Hotel Grand Mercure Medan, Jumat 19 Mei 2017





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Memimpin Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional
 Halaman Kantor Diskominfo Provsu, Senin 22 Mei 2017





KABID LAYANAN E GOVERNMENT DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Menerima Unjuk Rasa Satuan Penarik Becak Motor
Halaman Diskominfo Provsu, Rabu 24 Mei 2017

**Gubsu Erry Sampaikan LKPJ,
Rekomendasi Sesuai Tupoksi Akan Ditindaklanjuti**

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menerima rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti dengan para SKPD pada sidang paripurna Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Akhir Tahun Anggaran 2016, di ruang Paripurna DPRD Sumut, Jumat (26/5) sore.

"Rekomendasi ini tentunya kita teruskan kepada instansi terkait dan bilamana saran yang disampaikan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tentu akan menjadi perhatian kita semua dalam pelaksanaannya, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Daerah maupun instansi vertikal tentu ini akan diteruskan kepada masing-masing pihak untuk menjadi masukan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti," sebut Tengku Erry.

Menurut Gubernur, sejalan dengan rencana perbaikan sistim perencanaan dan penganggaran yang sudah menjadi komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu bahwa Pemprov Sumut melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting.

"Dengan demikian diharapkan semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang telah tercantum dalam perencanaan dan penganggaran yang transparan serta akuntabel," ucap Tengku Erry.

Sementara, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyebutkan menjadikan rekomendasi pansus dan pandangan fraksi sebagai dasar akan keputusan ini.

"Keputusan ini meminta Gubernur bisa meningkatkan kinerja di tahun 2017 ini sehingga target sasaran yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Sumatera Utara tahun 2013-2018 bisa terwujud," kata Wagirin.

Dalam paripurna LKPJ tersebut, hadir Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Nurhajizah Marpaung, Sekdaprovu Hasban Ritonga, sejumlah pimpinan SKPD Provsu, unsur FKPD Sumut, para wakil ketua dan anggota DPRD Sumut.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Membuka Sarasehan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
 Aula Dinas Lingkungan Hidup Kab. Labuhan Batu, Senin 29 Mei 2017



KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDUL AZIZ BATUBARA, S.SoS, M.AP
Mendampingi Wagubsu Audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pelopor Pemberantas KKN Judi dan Narkoba
Ruang Kerja Wagubsu, Senin 29 Mei 2017



KASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Diskominfo Provsu
Kabupaten Humbang Hasundutan, Rabu 31 Mei 2017





KADIS KOMINFO PROVSU II. MIID. FITRIYUS, SH, MSP
 Silaturahmi dan Buka Puasa bersama Masyarakat Kelurahan Martubung dalam rangka Safari Ramadhan 1438 H
 Kelurahan Martubung, Rabu 31 Mei 2017



JUNI

KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDULAZIZ BATUBARA, S.Sos, M.AP
Mendampingi Gubernur Sumatera Utara Menerima Kunjungan Duta Besar Taiwan
Ruang Kerja Gubsu, Kamis 8 Juni 2017



Diskominfo Provsu Pengajian Bulan Ramadhan

Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pengajian rutin selama bulan Ramadhan yang diselenggarakan di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Jumat (09/06).

Ustadz Amirwan, S.Ag dalam taushiyahnya mengatakan bahwa amalan yang harus dikerjakan pada bulan Ramadhan yaitu Istri yang berbuat baik kepada suami, perbanyak sedekah, saling tolong menolong kepada sesama dan bersabar dan bersyukur. Pengajian tersebut diikuti para Pejabat Eselon III & IV dan Staf Dinas Kominfo Provsu. (LIP)





KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDUL AZIZ BATUBARA, S.Sos, M.AP
 Mengikuti Rapat Koordinasi TPID Provsu dengan Komisi XI DPR RI
 Kantor Bank Indonesia (BI) Medan, Jumat 9 Juni 2017



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LPSE DISKOMINFO PROVSU HERMAN SITORUS, SH, MSP
 Menerima Kunjungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera dalam rangka Sosialisasi Syariat Zakat
 Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Senin 12 Juni 2017





KABID PIP DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
 Membuka Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Deli Serdang
 Aula Sultan Serdang Kabupaten Serdang Bedarai, Rabu 14 Juni 2017



Darto



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Memimpin Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Kerja Proyek Perubahan dalam rangka Diklat PIM Tingkat I Angkatan XXXVII
 Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Jumat 16 Juni 2017





Safari Ramadhan di Batubara

Wagubsu : Batubara Harus Manfaatkan Sebaiknya Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung

Batubara: Pembangunan tahap pertama pelabuhan internasional Kuala Tanjung yang diperkirakan beroperasi pada tahun ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh daerah sekitarnya terutama Kabupaten Batubara. Di antaranya pemanfaatan penyerapan lapangan kerja.

"Kalau sudah ada pelabuhan KualaTanjung nanti, seharusnya tidak ada lagi pengangguran di Batubara. Kecuali memang pribadinya pemalas. Pelabuhan hub internasional yang ada di daerah ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat," kata Wakil Gubsu Hj Nurjizah di Masjid Al Huda , Binjai Baru kec Talawi, Sabtu (18/06) sore.

Hal itu disampaikan di hadapan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, para jajaran SKPD Pemkab Batubara, unsur FKPD dan ratusan warga pada kegiatan Safari Ramadhan Pemprov Sumut di Batubara.

Dijelaskan Nurhajizah, pada tahun ini tahap Pertama pembangunan Kuala Tanjung akan selesai dan sudah bisa beroperasi. Kuala Tanjung segera akan dimanfaatkan sebagai hub internasional dan diharapkan menggerakkan perekonomian di Sumatera Utara. Terlebih lagi Pelabuhan Kuala Tanjung akan diintegrasikan dengan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun.

Karenanya, Nurhajizah mengajak Pemkab Batubara untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan daerah. "Ini adalah anugerah bagi Batubara," kata Nurhajizah. Seperti diketahui, Tahap I pelabuhan direncanakan memiliki fasilitas trestle sepanjang 2,7 km, dermaga sepanjang 500 meter, container yard dengan kapasitas 500.000 TEUs dan kedalaman 14 – 17 mLWS.



Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung meliputi rencana pengembangan terminal multipurpose dan terminal peti kemas (hub internasional).

Pembangunan dalam lima tahapan dengan target kapasitas ultimate dermaga sepanjang 1500 M dengan kapasitas hingga 13 juta TEUS. Menanggapi hal itu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan pihaknya akan berupaya keras mengambil momentum tersebut. "Sesuai dengan rencana pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten batubara sudah bersiap. Kami sudah mempersiapkan berbagai hal diantaranya tata ruang yang sudah kami ubah dan disesuaikan dengan rencana pusat, termasuk peraturan reklamasi.

Menurutnya, dengan keberadaan Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional, Kabupaten Batubara akan dikembangkan sebagai pusat industri aluminium. Karena menurutnya selama ini aluminium yang dihasilkan oleh PT Inalum yang ada di Batubara langsung diekspor. "Karenanya untuk mendapatkan nilai tambah bagi daerah, Batubara akan didorong menjadi pusat industri hilir aluminium," kata OK Arya.



Dijelaskanya pihaknya juga menyiapkan peruntukan lahan seluas 18 ribu hektar untuk pengembangan industri dan pelabuhan mulai dari dermaga Kuala Tanjung hingga ke pesisir pantai Perupuk.

Selain menyiapkan tataruang, pihaknya juga menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan melalui perguruan tinggi yaitu Akademi Komunitas yang berstatus negeri. "Kami punya Akademi Komunitas Negeri yang sudah masuk tahun ke tiga. Akademi ini cuma ada dua di Indonesia, yaitu di Bitung dan Batubara. Akademi ini untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja," jelas OK Arya.

Turut hadir mendampingi Wagubsu dalam Safari Ramadhan itu jajaran kepala SKPD Provsu yaitu Asisten Ekbang Ibnu Hutomo, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus, Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dahler, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Zony Walid, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Nurlila, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mhd Fitriyus, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Baharuddin Siagian, Kepala Biro Bina Sosial M Yusuf dan lainnya. Pada kesempatan itu Nurhajizah menyerahkan bantuan kepada para ulama dan santunan kepada 100 anak yatim/piatu.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke 60 Tahun kepada Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH
Ruang Kerja Sekda Provsu, Senin 19 Juni 2017





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MIH. FITRIYUS, SH, MSP
 Memimpin Rapat Penyusunan Proyek Perubahan dalam rangka DIKLAT PIM Tingkat I
 Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Selasa 20 Juni 2017





KABID PKP DISKOMINFO PROVSU ABDULAZIZ BATUBARA, S.Sos, M.AP
Menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara
Bank Indonesia Medan, Selasa 20 Juni 2017



Komisi Informasi Provinsi Sumut Gunakan Klausula Vexatious Request

Medan, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara (Sumut) telah menerapkan Vexatious Request bagi pemohon sengketa informasi. Penerapan yang dilakukan mulai 2017 itu, disampaikan Ketua KIP Sumut H. M. Zaki Abdullah dalam forum diskusi KIP Sumut dengan masyarakat Pers, Selasa (20/6) di Medan. Forum diskusi yang dirangkaikan dengan silaturahmi berbuka puasa bersama itu diikuti puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik ini merupakan salah satu program kerja KIP Sumut periode kedua 2017-2021, setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si pada 19 April lalu. "Saya dan Robinson Simbolon merupakan incumbent. Tiga lainnya Abdul Jalil, Eddy Syahputra dan Meyssalina M.I. Anuan merupakan komisioner baru."

Dijelaskannya, selama delapan tahun implementasi UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), ada warga negara tertentu juga ada LSM tertentu yang mengajukan permohonan informasi dalam waktu bersamaan, sampai puluhan. Badan publik yang disasar bukan hanya yang ada disekitar tempat tinggalnya, tetapi ada yang berlokasi jauh. Langkah ini dimungkinkan karena permohonan informasi bisa diajukan melalui surat berap pos atau melalui saluran elektronik. Model permohonan seperti itu secara normatif tidak salah, tetapi dalam praktiknya acap kali sulit dijalankan pemohon dalam waktu bersamaan jika timbul sengketa. Lambat laun, kata ketua PWI Sumut dua periode ini, tujuan meminta informasi untuk mengadvokasi masyarakat atau mengembangkan kapasitas pribadi dan lingkungannya jadi tidak tercapai.

Kesungguhan dan keseriusan pemohon untuk meminta informasi dan menggunakan informasi itu dengan baik akhirnya dipertanyakan. Kondisi itu juga berimbas pada jadwal sidang di komisi informasi. Apalagi jika pemohon bertindak diluar kewajaran jika permohonannya tidak dikabulkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas komisi informasi. "Ada yang marah marah, ada yang membentak," ungkapnya. Jadi, lanjut Zaki lagi, pengajuan permohonan dalam jumlah banyak dan terus menerus itulah yang lazim dikenal pegiat keterbukaan informasi sebagai vexatious request.

Melihat implikasi yang ditimbulkannya sesuai kewenangan yang dimilikinya, Komisi Informasi Pusat melahirkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Perki ini menggunakan istilah 'permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik'. Berdasarkan pasal 4 Perki, ada tiga jenis permohonan yang masuk kategori vexatious request. Pertama, mengajukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Kedua, mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa. Ketiga, pemohon saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melakukan pelecehan kepada petugas dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa. Dalam empat tahun terakhir vexatious request sebenarnya sudah sering dipakai badan publik sebagai argumentasi di sidang-sidang sengketa informasi.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
 Penandatanganan Berita Acara Fakta Integritas antara Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Diskominfo Provsu
 Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Rabu 21 Juni 2017



Rayakan Milad, Gubsu Erry Berbagi Berkah dengan Panti Asuhan Jamiyatul Washyiah dan Evangeline Booth

Medan, Dalam rangka memperingati kelahirannya (Milad) yang ke-53 Tahun Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berbagi berkah dengan mengunjungi Yayasan amal dan Sosial Panti Asuhan dan Perguruan Al Jamiyatul Washyiah di Jalan Ismailiyah No 82 Medan, Jumat (30/06). Selain bersilaturahmi dengan keluarga besar panti asuhan tersebut, Tengku Erry juga berkesempatan berbagi berkah dengan memberikan sejumlah kebutuhan pokok ke panti tersebut. Turut hadir mendampingi Gubsu, Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI Purn Hji Dr Nurhojijah Marpaung SH MH, Sekda Provsu Hasban Ritonga, dan tokoh agama diantaranya Buya KH Amiruddin MS, Dr Maratua Simanjuntak dan juga para Asisten, staf ahli Gubsu dan pimpinan SKPD Provsu diantaranya Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Dahler, Kadis Tanaman Pangan Azhar, Kabiro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus, dan Kadishub Antoni Siahaan.

Dalam sambutan sebelum memimpin doa Buya KH Amiruddin mengingatkan akan pentingnya bersilaturahmi. Bahkan Allah menjelaskan dalam Alquran bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan persaudaraannya dan ketaqwaannya kepada Allah.

"Hari Jumat pertama di bulan Syawal ini, tepatnya tanggal 30 Juni 2017 ini Bapak Dr Ir Erry Nuradi MSi berulang tahun. Mari kita doakan beliau senantiasa di beri kesehatan dan kesuksesan memimpin Sumut. Hari ini kami datang beramai-ramai karena Bapak Gubernur ini dicintai rakyatnya. Saya berharap jalinan silaturahmi ini terus berlanjut hingga di masa-masa mendatang," ujar Amiruddin.

Ketua Yayasan amal dan Sosial Panti Asuhan dan Perguruan Al Jamiyatul Washyiah H M Silahuddin mengaku bangga atas kunjungan Tengku Erry dan rombongan ke Panti Asuhan binaannya. Kehadiran Tengku Erry dan rombongan diharapkan dapat menambah motivasi pihaknya dalam memenuhi kebutuhan fisik dan spritual anak-anak penghuni panti asuhan.

Dikatakan Silahuddin bahwa Panti Asuhan ini telah berdiri sejak tahun 1935. Seiring dengan perjalanan waktu Anti Asuhan Al Jamiyatul Washyiah saat ini memiliki anak asuh sebanyak 175 orang.



Tengku Erry mengatakan bahwa kehadiran dirinya bersama rombongan dalam rangka berbagi berkah kepada warga panti Asuhan sekaligus dalam rangka peringatan Milad dirinya.

"Alhamdulillah setelah tadi pagi di rumah dinas tadi ada acara, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Panti Asuhan ini. Kita ingin berbagi berkah kepada anak-anak panti disini" ujar Tengku Erry.

Sementara itu ditempat terpisah rombongan Sekda Provsu Hasban Ritonga dan sejumlah pimpinan SKPD Provsu mengunjungi Panti Asuhan putri Evangeline Booth Medan di Jalan Samanhudi. Dipanti asuhan ini Sekda dan rombongan disambut nyanyian dari anak-anak panti yang merupakan ucapan selamat ulang tahun kepada Tengku Erry yang ke-53. Dalam kesempatan itu Sekda Provsu mewakili Gubsu menyampaikan ucapan salam kepada anak-anak penghuni panti maupun pengurus panti

"Bapak Gubernur kebetulan tadi ada kegiatan yang sama di panti asuhan yang lain. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Mari kita doakan Bapak Gubernur kita sehat dan sukses selalu," ujar Hasban.

Pimpinan Panti Asuhan putri Evangeline Booth Leni Nirwanto menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan dan bantuan Tengku Erry dalam rangka Ulang Tahunnya yang ke 53.

